

PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI YAYASAN DALAM RANGKA MENCEGAH PRAKTIK PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*)

Dwi Cesaria Sitorus ^{*)}

Bismar Nasution ^{**)}

Windha ^{***)}

ABSTRACT

Money laundering crime should be prevented as early as possible in order to create a country with a moral society. The practice of money laundering can occur both through banking and non-banking institutions, such as insurance and foundations. With the foundation, all the desires of social, humanitarian, and religious people can be realized in an institution that has been recognized and accepted its existence. In principle there is a foundation of accountability and transparency that has an important role to prevent money laundering.

There are some basic issues to be discussed in this thesis writing. A primary issue is how the practice of money laundering in Indonesia, how the existence of the foundation in the Indonesian legal system, and how the application of the principles of accountability and transparency of foundations in order to prevent money laundering.

The method used in the thesis writing is done with normative juridical approach is to perform an analysis of the problems with the approach to the principles of law and refers to the legal norms contained in the legislation. The study was conducted with an emphasis on the data library by library research, which conducts research using materials from a variety of reading materials such as legislation, books, magazines, and the Internet.

The principle of accountability and transparency is needed in conducting business foundation itself. This is in order to prevent money laundering practices that function Foundations of Law No. 16 of 2001 jo. Law No. 28 of 2004 and Law No. 8 of 2010 Concerning the Prevention and Suppression of Money Laundering can be carried out in accordance with these provisions.

Key words : Akuntabilitas, Transparansi, Yayasan, Pencucian Uang

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dapat terjadi setelah dilakukannya kejahatan awal atau asal (*predicate offence*). Pencegahan praktik pencucian uang tidak hanya dapat diatasi dengan adanya Undang-Undang TPPU, melainkan juga harus dibantu dengan adanya peraturan lain yang bersangkutan dengan praktik pencucian uang tersebut, misalnya dalam yayasan, maka sangat diperlukan Undang-Undang Yayasan untuk membantu terselenggaranya pencegahan praktik pencucian uang tersebut.

Pengaturan yayasan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Yayasan), merupakan perwujudan politik hukum nasional dalam pembentukan hukum baru. Dengan pengaturan tersebut, yayasan ditegaskan sebagai badan hukum, sehingga mempunyai landasan hukum yang kuat dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Dalam yayasan terdapat prinsip akuntabilitas dan transparansi yang wajib dijadikan acuan utama oleh tiap-tiap yayasan dalam menyusun kebijakan dan prosedur penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi ini diharapkan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dapat dicegah terutama pada sektor keuangan.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis melakukan penelitian dengan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan tipe penelitian deskriptif maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah yakni bagaimanakah praktik tindak pidana pencucian yang di Indonesia, dan bagaimanakah keberadaan yayasan dalam sistem hukum Indonesia, dan kemudian bagaimanakah penerapan prinsip akuntabilitas transparansi yayasan dalam rangka mencegah praktik pencucian uang (*money laundering*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

1. Pengertian Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh kejahatan terorganisir (*organized crime*) maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya.¹ Hal ini bertujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal.²

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, mendefinisikan pencucian uang atau *money laundering* sebagai:³

“Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.

2. Mekanisme Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang, yaitu sebagai berikut:

a. Placement

Placement (penempatan) merupakan upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.

b. Layering

Layering (transfer) merupakan upaya mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan yang lain.

c. Integration

Integration (penggabungan) merupakan upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan (*placement*) atau transfer (*layering*) sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean*

*) Penulis.

**) Dosen Pembimbing I.

***) Dosen Pembimbing II.

¹Yunus Husein, “PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Hukum Bisnis*, (Volume 22 Nomor 3, 2003), hal. 26.

²*Ibid.*

³Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hal. 5.

money), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.⁴

3. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang dibedakan dalam tiga tindak pidana:

- a. Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁵
- b. Tindak pidana pencucian uang dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁶

- c. Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.⁷

4. Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia

Tindak pidana pencucian uang dapat terjadi setelah dilakukannya kejahatan awal atau asal (*predicate offence*), misalnya korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dan perjudian. Setelah itu, proses pencucian uang tersebut terjadi ketika uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan sendiri atau bersama yang dapat dilakukan melalui beberapa bidang, diantaranya: 1. Perbankan, 2. Asuransi, 3. Yayasan, 4. Adapun untuk melakukan kejahatan kembali, misalnya di bidang narkoba ataupun kejahatan lainnya.

⁴Yenti Ganarsih, *Op. Cit.*, hal. 56.

⁵Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 3.

⁶Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 4.

⁷Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 5.

B. KEBERADAAN YAYASAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

1. Pengertian Tentang Yayasan

Yayasan tumbuh, hidup dan berkembang sehingga setiap kegiatan non profit yang dilembagakan akan memakai lembaga bentuk yayasan.

Menurut NH. Bregstein, yayasan adalah:⁸ "Suatu badan hukum, yang didirikan dengan suatu perbuatan hukum, yang tidak bertujuan untuk membagikan kekayaan dan suatu penghasilan kepada pendiri atau penguasanya di dalam yayasan itu, atau kepada orang-orang lain kecuali sepanjang mengenai yang terakhir ini adalah sesuai dengan tujuan yayasan yang idealistisi."

Menurut Hayati Soeroredjo, yayasan harus bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan serta idealistis dan pasti tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan.⁹ Rochmat Soemitro, mengemukakan bahwa yayasan merupakan suatu badan hukum yang lazimnya bergerak di bidang sosial dan bukan menjadi tujuannya untuk mencari keuntungan, melainkan tujuannya ialah untuk melakukan usaha yang bersifat sosial.¹⁰

2. Pengaturan Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004

Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, hal tersebut dimaksudkan untuk lebih menjmain kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemaaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi yayasan sebagai

pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Perubahan Undang-Undang Yayasan dilakukan bukan untuk penggantian undang-undang, dalam arti undang-undang yang lama diganti dengan yang baru.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tidak mengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Perubahan itu hanya sekedar mengubah sebagian pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tidak sampai mengubah seluruh pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.

Ada 4 (empat) prinsip yang harus dimiliki Yayasan sesuai dengan harapan Undang-Undang Yayasan, yakni:¹¹

- a. Kemandirian Yayasan sebagai badan hukum;
- b. Keterbukaan seluruh kegiatan Yayasan;
- c. Akuntabilitas publik; dan
- d. Prinsip nirlaba.

Prinsip yang ingin diwujudkan dalam ketentuan Undang-Undang Yayasan adalah kemandirian yayasan sebagai badan hukum, keterbukaan seluruh kegiatan yang dilakukan yayasan, dan akuntabilitas kepada masyarakat mengenai apa yang telah dilakukan oleh yayasan, serta prinsip nirlaba yang merupakan prinsip yang fundamental bagi suatu yayasan. Namun, prinsip yang sangat menonjol adalah prinsip akuntabiitas dan transparansi yayasan, yang bahkan telah dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Yayasan alinea 4 (empat)

⁸NH. Bregstein, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*, (Bandung: Mandar Madju, 2003), hal. 110.

⁹Hayati Soeroredjo, *Hukum Yayasan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 71.

¹⁰Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, (Bandung: Alumni, 2002), hal. 161.

¹¹Helex Wirawan, "Tanggung Jawab Hukum Bagi Organ Yayasan", <http://www.baganintheworld.com/tanggung-jawab-hukum-bagi-organ-yayasan/>.

C. PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI YAYASAN DALAM RANGKA MENCEGAH PRAKTIK PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*)

1. Pengertian Tentang Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Definisi yang sama disebutkan bahwa akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya.

2. Pengertian Tentang Prinsip Transparansi

Transparansi adalah suatu proses keterbukaan dari para pengelola manajemen, utamanya manajemen publik, untuk membangun akses dalam proses pengelolaannya sehingga arus informasi keluar dan masuk secara berimbang. Jadi dalam proses transparansi, informasi bukan saja diberikan oleh pengelola manajemen publik tetapi masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang menyangkut kepentingan publik, sehingga kesadaran ini akan mengubah cara pandang manajemen publik di masa mendatang.¹² Masyarakat tidak lagi pasif menunggu informasi dari pemerintah atau dinas-dinas penerangan pemerintah tetapi mereka berhak mengetahui segala sesuatu yang menyangkut keputusan dan kepentingan publik.¹³

3. Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Yayasan Dikaitkan Dengan Pencegahan Praktik Pencucian Uang

Penerapan atau perbuatan mempraktikkan suatu prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam yayasan dapat dilihat dari aturan yang terletak dalam Undang-Undang Yayasan itu sendiri. Hal

ini diketahui dari peraturan yang menyangkut mengenai kekayaan yayasan yang dapat diperoleh dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut harus dapat dipastikan bahwa kekayaan yang diperoleh yayasan bukanlah merupakan suatu hasil tindak pidana pencucian uang. Maka organ yayasan yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas harus dapat lebih cermat dan teliti untuk dapat mengelola harta kekayaan yayasan dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi untuk mencegah terjadinya praktik tindak pidana pencucian uang dalam yayasan.

Pengelolaan yayasan yang profesional adalah pengelolaan yayasan yang memiliki prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Penjelasan Undang-Undang Yayasan alinea 4 (empat) berbunyi:

“Selain itu, mengingat peranan Yayasan dalam masyarakat dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka penyempurnaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimaksudkan pula agar Yayasan tetap dapat berfungsi dalam usaha mencapai maksud dan tujuannya di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.”

Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi tersebut sangatlah penting dalam mengelola sebuah yayasan. Hal ini dikarenakan, organ yayasan yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas harus lebih bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban untuk menjelaskan bagaimana realisasi otoritas yang diperolehnya tersebut serta terbuka dalam segala laporan yang memuat catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha yayasan ataupun dokumen keuangan yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan. Selain itu, Akuntan publik yang memiliki kewajiban dalam hal mengaudit laporan keuangan yayasan haruslah melaksanakan kewajibannya dengan

¹²Joe Fernandez, “Partisipasi Dan Transparansi”, <http://www.ipcos.or.id/articles/32-participation/23-partisipasi-dan-transparansi-dalam-pembangunan.html>.

¹³*Ibid.*

penuh bertanggung jawab sehingga kekayaan yang dimiliki oleh yayasan dalam jumlah tertentu dapat diketahui oleh masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas yang terdapat dalam Undang-Undang Yayasan itu sendiri. Hal tersebut dilakukan agar dapat untuk mencegah terjadinya praktik tindak pidana pencucian uang dalam yayasan.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan, maka pada akhir penulisan skripsi ini dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Praktik tindak pidana pencucian uang merupakan suatu hal yang sering dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan banyak cara, misalnya melalui melalui bidang perbankan, pasar modal, asuransi, yayasan, ataupun untuk melakukan kejahatan kembali, misalnya di bidang narkoba ataupun kejahatan lainnya. Banyak pelaku tindak pidana pencucian uang mulai beralih pada sektor non perbankan dalam melakukan pencucian uangnya. Hal ini terutama sejak pemerintah mulai memperketat sistem pengawasan perbankan, sehingga membuat para pelaku praktik pencucian uang ini beralih ke lembaga keuangan non bank (LKNB), misalnya usaha asuransi jiwa dan yayasan. Penyebab terjadinya pencucian uang ini pada dasarnya terletak pada faktor antara lain kelemahan dalam peraturan keuangan atau perbankan serta keseriusan pihak perbankan atau pemerintah untuk mencegah praktik pencucian uang.
2. Keberadaan yayasan dalam sistem hukum Indonesia merupakan suatu lembaga yang tujuannya bersifat sosial, kemanusiaan dan keagamaan yang menjadikan yayasan sebagai badan hukum non profit/nirlaba. Organisasi nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa

ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter). Keberadaan yayasan bukanlah suatu hal yang baru, bahkan sudah ada sejak zaman kolonial, tetapi belum diakui. Namun keberadaan yayasan sekarang telah diakui dengan diberlakukannya hukum positif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, yang secara tegas menyebutkan bahwa yayasan adalah Badan Hukum.

3. Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi yayasan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka mencegah praktik pencucian uang (*money laundering*). Penerapan prinsip tersebut telah dilaksanakan dalam yayasan itu sendiri, hal ini dapat dilihat dengan adanya kewajiban organ yayasan yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas yang harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar, misalnya melalui ketentuan mengenai laporan tahunan dalam yayasan. Dalam prinsip akuntabilitas harus menyampaikan sesuatu berdasarkan data memberikan laporan, berkomunikasi dan bertindak sesuai dengan kenyataan dan data yang sebenarnya. Sedangkan dalam prinsip transparansi harus memberikan laporan dengan terbuka dan obyektif, yang mencakup laporan mengenai transaksi tanpa ada pemalsuan, berlebihan ataupun menyembunyikan sesuatu, sehingga dapat diakses dengan mudah dan dipahami oleh pihak-pihak terkait.

B. SARAN

Beberapa saran yang dapat diajukan dari hasil pembahasan pada penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Pemerintah diharapkan agar tetap konsisten dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sehingga Indonesia tidak masuk lagi ke dalam daftar hitam (*black list*) sebagai

negara yang dikategorikan tidak kooperatif dalam memerangi kejahatan pencucian uang atau *Non-Cooperative Countries and Territories* (NCCT's).

2. Undang-Undang Yayasan perlu disosialisasikan, agar pengurus yayasan maupun masyarakat luar memahami prosedur pendirian yayasan sebagai badan hukum. Untuk itu, pemerintah diharapkan mengadakan pengawasan yang ketat terhadap praktik pengelolaan yayasan yang melakukan kegiatan usaha komersil, karena

kalau tidak yayasan akan kehilangan fungsi sosialnya.

3. Akuntan publik yang memiliki kewajiban dalam hal mengaudit laporan keuangan yayasan haruslah melaksanakan kewajibannya dengan penuh bertanggung jawab sehingga kekayaan yang dimiliki oleh yayasan dalam jumlah tertentu dapat diketahui oleh masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas yang terdapat dalam Undang-Undang Yayasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ais, Chatamarrasjid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2000.
- Amirrudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Setiadi, Edi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Ganarsih, Yenti, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money laundering)*, cet. 1, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Bregstein, NH., *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*, Bandung: Mandar Madju, 2003.
- Soeroredjo, Hayati, *Hukum Yayasan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Soemitro, Rochmat, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, (Bandung: Alumni, 2002).

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Surat kabar, Majalah, Internet

- Yunus Husein, "PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 Nomor 3, 2003.
- Sutan Remi Sjahdeini, "Pencucian uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor Penyebab, dan Dampak bagi masyarakat", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 Nomor 3, 2003.
- Joe Fernandez, Partisipasi Dan Transparansi, <http://www.ipcos.or.id/articles/32-participation/23-partisipasi-dan-transparansi-dalam-pembangunan.html>.